PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

UNIT KERJA : **PIMPINAN TERTINGGI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARMIDJI**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **74958**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 11.414.879.000

1. Tanah Seluas 1638 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 402.948.000
2. Tanah Seluas 1638 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 402.948.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 256.500.000
4. Tanah Seluas 1638 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 402.948.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/336 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 571.748.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.238.844.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 256.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/540 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.593.600.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/158 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 289.295.000
10. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 88.920.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 290.310.000
12. Tanah Seluas 639 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL

SENDIRI Rp. 546.345.000

13. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 68.400.000
14. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 376.045.000
15. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.083.240.000
16. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.070.496.000
17. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 256.500.000
18. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 256.500.000
19. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 328.536.000
20. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 328.536.000
21. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 328.536.000
22. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 328.536.000
23. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 162.162.000
24. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 162.162.000
25. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 162.162.000
26. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 162.162.000

B.	**ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**	**Rp.**	**180.000.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA CRV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW CAMRY Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**178.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**

E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.664.186.898
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	13.437.065.898
III.	HUTANG	Rp.	1.130.884.878
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.306.181.020

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.